

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PIDANA KEPADA ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN PASAL 82  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum*

**Oleh :**

**Sabattino Hasta Ardiansha**

**0510110168**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2011**

## LEMBAR PERSETUJUAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
KEPADA ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PASAL 82  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang)

Oleh:

**Sabattino Hasta Ardiansha**

NIM. 0510110168

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sumiyanto, SH.,MH.

NIP: 19521215 198003 1 002

Setiawan Nurdayasakti,SH.,MH.

NIP: 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH. M.Hum

NIP: 19590406 198601 2 001

## LEMBAR PENGESAHAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
KEPADA ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PASAL 82  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK

(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang)

Oleh:

**SABATTINO HASTA ARDIANSHA**

NIM. 0510110168

Skripsi ini telah disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sumiyanto, SH.,MH.

Setiawan Nurdayasakti,SH.,MH.

NIP: 19521215 198003 1 002

NIP: 19640620 198903 1 002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Sumiyanto, SH.,MH.

Eny Harjati, SH. M.Hum

NIP: 19521215 198003 1 002

NIP: 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, SH. MH.

NIP: 19591216 198503 1 001



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat marifat, kecerdasan, serta karunia yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar keserjanaan dalam ilmu hukum.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan, doa, inspirasi dan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

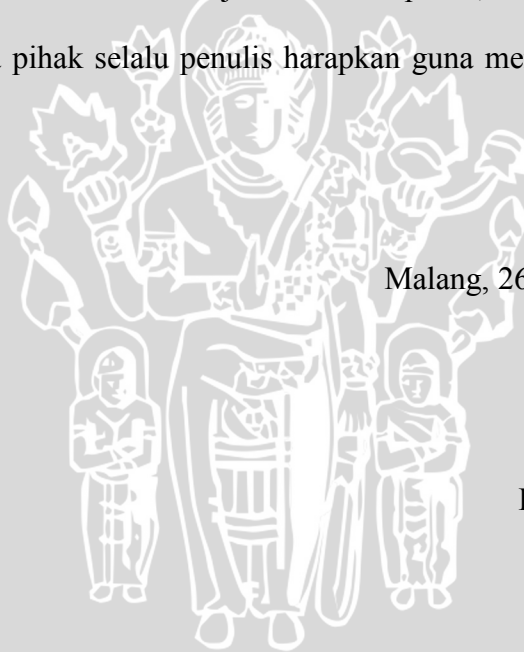
1. Bapak Dr. Sihabudin, SH.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.MH., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Sumiyanto, SH.MH. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran, ketelitian membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ninil Eva Yustina, SH.Mhum. yang telah membantu dan memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Papa dan Mama tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk berprestasi. Tidak ada yang bisa penulis lakukan untuk bisa membalas semua kasih sayang, doa, harapan dan semuanya yang Kau berikan. Semoga kau bangga dengan ini.
6. Nenekku terkasih yang selalu tiada henti berdoa untuk penulis agar segera dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Adikku tercinta yang telah memberikan semangat untuk selalu belajar tanpa pernah putus asa serta kasih sayang dan doa yang tidak terhingga kepada penulis.
8. Nourma Fitria Han Etlina yang telah membantu dan menemani selama penulisan ini dengan setia dan sabar.
9. Ramot Elieser Siagian dan Daniel Tarigan karena telah banyak membantu dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan dan doanya.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik konstrutif dari semua pihak selalu penulis harapkan guna memperbaiki skripsi ini.

Malang, 26 September 2011

Penulis





## ABSTRAKSI

*Sabattino Hasta Ardiansha, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2011, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang), Sumiyanto, Dr. S.H., M.H., Setiawan Nurdyasakti, S.H., M.H.*

Dalam penulisan skripsi ini, Peneliti mengangkat judul "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang)". Adapun Permasalahan yang diteliti adalah (1) Bagaimana realita perkara tindak pidana pencabulan yang terjadi dalam wilayah Pengadilan Negeri Kepanjen, (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan yang melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris, yaitu suatu upaya untuk memperoleh data yang dilakukan secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yuridis empiris ini dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam mengadili perkara pencabulan terhadap anak.

Dari hasil penelitian lapangan, diperoleh data dalam kurun waktu 2004-2009 Pengadilan Negeri Kepanjen telah menangani 3 (tiga) kasus pencabulan terhadap anak. Kasus pertama terjadi pada tahun 2005 dengan nomor perkara 44/Pid.B/2005/PN.KPJ, kasus kedua terjadi pada tahun 2006 dengan nomor perkara 688/Pid.B/2006/PN.KPJ dan kasus ketiga terjadipada tahun 2009 dengan nomor perkara 1198/Pid. B/2009/PN. KPJ. Ketiga perkara tersebut dikenakan Pasal 82 Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan realita mengenai perkara pidana Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah melalui proses persidangan dan memperoleh kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Kepanjen dapat diketahui bahwa terdapat variasi putusan berdasarkan berat ringanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah Hukum Pidana Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim, Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim, Tuntutan Masyarakat Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim. Dalam menentukan lama masa pidana Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak seperti faktor hukum pidana, faktor subyektif terdakwa, faktor tuntutan jaksa, dan faktor tuntutan masyarakat, serta faktor-faktor lain yang terungkap dalam persidangan yang meringankan maupun memberatkan pidana bagi terdakwa, maka Majelis Hakim memutuskan, dalam kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2009 dengan terdakwa Angga Septian Bagus Cahyono tersebut, Majelis Hakim memutuskan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 3 (tiga) tahun dan denda 10 juta rupiah subsidair 1 bulan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Mengingat anak adalah aset bangsa yang sangat berharga, maka Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan dan untuk keperluan itulah Negara membuat seperangkat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kesemuanya itu memuat dan mengatur mengenai hak-hak anak Indonesia. Anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan baik dari Negara maupun keluarga dan anggota masyarakat lainnya.



Berdasarkan data yang tercatat di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, telah terjadi kasus tindak pidana pencabulan sebanyak 10 kasus. Beberapa kasus di antaranya, anak-anak merupakan pelaku tindak pidana pencabulan terbanyak, yaitu 3 kasus. Contohnya seperti kasus yang terjadi bulan Januari. Peristiwa tersebut menimpa Selvy, gadis berusia 14 tahun ini harus kehilangan kehormatannya sebagai wanita karena pacarnya sendiri yang bernama Angga yang berusia 16 tahun. Kejadian tersebut bermula saat Angga dan Selvy berkenalan, pelaku (Angga) dan korban (Selvy) sama-sama masih duduk di bangku SMP. Setelah mereka berkenalan, kemudian mereka mulai pacaran, sering bertemu dan saling telepon, pelaku sering bertemu korban di took dekat rumah korban, sedangkan korban juga sering ke rumah pelaku. Setiap hendak bertemu antara pelaku dan korban, sehari sebelumnya selalu janji lewat telepon maupun SMS, besok paginya pukul 9 pagi mereka bertemu di pangkalan ojek dekat rumah pelaku, kemudian pelaku mengajak korban ke rumah nenek pelaku yang bernama Kasiyah karena keadaannya sepi sejak pagi, setiap hari kakek dan nenek pelaku berjualan nasi di pasar. Setelah berada di rumah nenek pelaku, mereka mengobrol lebih dahulu, kemudian pelaku mengajak masuk kamar untuk bercumbu rayu, kurang lebih satu jam kemudian pelaku mengajak korban untuk bersetubuh. Semula korban tidak mau karena takut hamil, tetapi karena bujuk rayu pelaku, akhirnya korban mau tetapi tidak sampai bersetubuh dengan pelaku. Pelaku hanya menggesek-gesekkan alat vitalnya ke alat vital korban. Pencabulan antara pelaku dengan korban ini terjadi sebanyak 3 kali dengan waktu dan tanggal yang berbeda.



Sebagai contoh, terdapat beberapa kasus pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelakunya, antara lain:

1. “Kasus pemerkosaan anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah hukum Toraja Utara (Torut). Mar, 15, warga Kampung Balele, Kelurahan Sadan’ Mataallo, Kecamatan Sadan, yang baru saja menyelesaikan sekolahnya di bangku SMP itu, menjadi korban pemerkosaan yang diduga dilakukan, Ard, 17, yang masih tercatat di salah satu SMK di Torut.

Saat dimintai keterangannya di depan penyidik Polres Tator, Ard mengaku membawa kabur Mar tanpa sepengetahuan orang tua korban, ke salah satu rumah kosong selama tiga hari tiga malam. Selama itu pelaku memerkosa korban lima kali disertai ancaman. “Saya mengajak Mar ke sebuah rumah kosong, seusai menghadiri pesta orang mati salah satu warga di Kampung Buntu Lobo. Di rumah itu, saya meminta Mar, yang juga mantan pacar, melayani nafsu saya.

Kalau korban tidak mau, saya mengancam tidak akan mengantarnya pulang kembali ke rumahnya,” kata Ard saat dimintai keterangannya di Mapolres Tator kemarin. Dia nekat memerkosa Mar karena tidak tahan menahan nafsunya akibat pengaruh film porno yang pernah ditontonnya. Dia pun membawa pulang Mar setelah puas melampiaskan nafsu berahinya.

Sementara itu, korban didampingi orang tua dan pengacara, Gemaria, menyatakan, saat pertama kali diperkosa, korban dipaksa pelaku dengan menyumbat mulutnya dengan kain agar tidak berteriak. Pemerkosaan itu, bahkan dilakukan pelaku hingga lima kali. Sementara itu, penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tator Bripda Betharia Isma menyatakan, pelaku pemerkosaan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, tersangka diancam Pasal 82 UU No 23/2002 dan Pasal 287 dan 332 KUHP karena membawa lari dan memerkosa anak di bawah umur.”<sup>1</sup>

2. “Gara-gara kecanduan film porno di internet, HF (16) pelajar SMP yang juga warga Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti Gresik tega mencabuli Bunga (6) bocah TK nol besar tetangga sendiri.

Kasus pencabulan ini sebenarnya terjadi pada bulan April 2011 lalu. Namun, baru dilaporkan awal pekan ini. Akibat pencabulan yang dilakukan HF kondisi Bunga sampai saat ini masih trauma.

Kasus pencabulan ini terungkap setelah orang tua Bunga melaporkan HF ke polisi. Dalam laporannya disebutkan Bunga

---

<sup>1</sup>www.makassarterkini.com diakses pada 20 Agustus 2011

pada saat itu sedang bermain di halaman. Tiba-tiba HF datang dan mengajaknya masuk ke dalam rumah, yang pada bersamaan pula rumahnya sedang kosong. Di dalam rumahnya, Bunga diminta melepas bajunya dengan alasan mau dimandikan.

Bukan dimandikan, tapi malah alat kelaminnya diraba-raba oleh HF. Untungnya tidak sampai terjadi perkosaan. Bahkan, HF sempat menggesek-gesekkan kemaluannya ke alat kelamin korban. Namun saat tidak sampai terjadi perkosaan, orang tua Bunga keburu mencarinya.

Saat tiba di rumahnya, orang tua Bunga curiga melihat putrinya kencing sambil menahan tangis. Saat ditanya kenapa menangis, Bunga menceritakan kalau alat kelaminnya sakit. Bunga mengatakan jika alat vitalnya baru dikerjai oleh HF. Mendengar pengakuan Bunga, orang tuanya lalu melaporkan masalah itu ke Polsek Menganti.

Kapolsek Menganti AKP Dedi Iskandar saat dikonfirmasi membenarkan laporan tersebut. Pihaknya kemudian mengamankan HF ke Mapolsek Menganti serta memeriksa korban.

"Berdasarkan hasil visum menyebutkan, tidak ada perkosaan yang dialami korban. Selaput dara korban masih utuh, hanya bagian luarnya saja yang bengkak akibat digesek-gesek oleh tersangka HF," kata AKP Dedi Iskandar, Rabu (4/05/2011).

AKP Iskandar menambahkan, dari pengakuan tersangka HF dirinya mencabuli Bunga karena kecanduan melihat film porno di internet. "Karena kasusnya menyangkut pencabulan dan melibatkan anak-anak, kami melimpahkannya ke Unit PPA Satreskrim Polres Gresik," tandasnya.<sup>2</sup>

3. "Kasus pelecehan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam kurun tahun 2010 meningkat dibandingkan dengan tahun 2009 akibat dampak pornografi lewat warnet.

"Kalau laporan data KPA (Komisi Perlindungan Anak) selama tahun 2010, total kasus kekerasan terhadap anak memang meningkat termasuk di dalamnya kasus pelecehan seksual terhadap anak," kata Ketua KPA Kabupaten Malang, Pantjaningsih, Selasa 24/5).

Berdasarkan data kasus kekerasan terhadap anak kurun 2009 mencapai 245 kasus, yakni kekerasan fisik mencapai 81 kasus, psikis 48 kasus, seksual 50 kasus, penelantaran 31 kasus, "trafficking" 10 kasus dan eksploitasi terhadap anak mencapai 25 kasus.

Data tahun 2010 mencapai 217 kasus yakni kekerasan fisik mencapai 79 kasus, psikis 15 kasus, seksual 93 kasus,

---

<sup>2</sup>[www.kaskus.usdiakses](http://www.kaskus.usdiakses) pada 20 Agustus 2011



penelantaran 18 kasus, "trafficking" nihil dan eksploitasi 12 kasus.

"Kalau dilihat rata-rata berdasarkan data di atas yang paling menonjol peningkatannya adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang mencapai 93 kasus di tahun 2010 dari 50 kasus di tahun 2009," katanya saat ditemui di kantor Pendopo Kabupaten Malang.

Meningkatnya kasus pelecehan seksual ini kata Pantjaningsih, akibat berubahnya pola bermain anak yakni sebelumnya langsung berinteraksi dengan lingkungan dan orang, namun saat ini berubah drastis tidak langsung bersentuhan dengan lingkungan atau masyarakat.

"Kecenderungan anak yang saat ini lebih suka bermain game dan bermain di warnet menyebabkan kasus pelecehan seksual meningkat, karena banyaknya akses porno di dalam permainan tersebut," katanya.

Ia menjelaskan, meningkatnya data rata-rata laporan KPA secara keseluruhan juga akibat semakin sadarnya masyarakat dalam melapor apabila mereka dirugikan sehingga data laporan kekerasan terhadap anak menjadi meningkat.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan meningkatnya kekerasan terhadap anak adalah kemiskinan penduduk yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

"Kemiskinan bisa dikatakan pula sebagai faktor keluarga tidak bisa memenuhi hak-hak anak, sehingga mudah terjadi kekerasan terhadap anak secara fisik dan psikis," katanya.

Berdasarkan data kemiskinan di wilayah Kabupaten Malang, dari total 390 desa yang ada, sedikitnya 110 desa termasuk dalam desa miskin yang kurang bisa memenuhi hak-hak anak, berupa pendidikan, kesehatan serta kepentingan anak lainnya.

Oleh karena itu, dirinya dengan Pemkab Malang terus mendorong upaya agar sejumlah desa bisa memenuhi hak-hak anak, agar terhindar dari kasus kekerasan terhadap anak.

"Upaya kita terus melakukan perbaikan, hal ini terbukti pada tahun 2009 lalu Kabupaten Malang menerima penghargaan dari lembaga asing terkait perlindungan anak ini," katanya.

Sementara itu, data kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Malang, terjadi pada anak usia 0 hingga 18 tahun. "Kategori anak adalah usia 0-18 tahun," ujarnya.<sup>3</sup>

4. "Tak disangka, Diyana (17), warga asal Kec.Balangan, Kab.Indramayu, harus rela disetubuhi oleh seorang anak ulama yang juga ketua MUI Kab.Cirebon, Hamid (17), pada 31 Desember 2010 dilingkungan dekat salah satu Pondok

---

<sup>3</sup>[www.komhukum.com](http://www.komhukum.com) diakses pada 20 Agustus 2011



Pesantren milik ayah pelaku. Karuan keluarga korban pun berontak lalu melaporkannya kepihak Polres Sumber.

Menurut Pengakuan ibu kandung korban, Nur'aeni (37) didampingi adiknya, Hasbullah (35), sudah melaporkan kasusnya ke pihak Polres Sumber. Bahkan sebelum itu sudah dilakukan musyawarah keluarga untuk mencari jalan keluar yang terbaik, namun pihak keluarga pelaku justru malah mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum, terpaksa pihak keluarga korban pun melaporkannya ke Polisi.

Menurut cerita Nur'aeni, saat itu ayahnya Abdullah Kamali bin Ahmad, yang tinggal di Palimanan Barat, Kec. Gempol, Kab. Cirebon hendak menyalakan lampu listrik rumah yang ditinggalkan kosong pemiliknya ke luar negeri (TKI), saat itu hari Jum'at (27/12/2010) sekitar pukul 20.00 wib. Namun Abdullah kaget karena lampu rumah sudah menyala, karena penasaran kemudian mengeceknya.

"Alangkah tersentaknya saya setelah melihat cucunya sudah bugil hanya menggunakan celana dalam saja bersama seorang lelaki yang tak lain adalah Hamid, lalu saya bertanya perbuatan apa yang sudah kalin lakukan, jawab cucu saya, barusan dipaksa untuk berbuat zinah dan baru selesai disetubuhi, namun saat ingin bertanya ke Hamid, melarikan diri dulu ke rumahnya yang berada dilingkungan Pondok Pesantren," ujar pengakuan Abdullah didampingi ibu korban, Nur'aeni dan Hasbullah.

Sementara menurut Hasbullah, pihaknya sudah melayangkan surat laporan pengaduan tentang kasus ini ke pihak Polres Sumber sekitar 27 Januari 2011. Namun hingga kini kasusnya belum juga diproses dengan berbagai alasan, termasuk saksi kuat dan lain sebagainya. "Saya mengerti mungkin ini ada tekanan dari atas, karena ayah dari pelaku pencabulan adalah orang besar, apalagi di pusat adik dari ayahnya Hamid juga adalah orang besar, sehingga ada dugaan kasusnya mau digantung," ujarnya.

"Terpaksa karena berkasnya belum juga diproses di Polres Sumber, Rabu (20/04) kemarin, langsung ke MUI Pusat, sedang Kamisnya (21/04) pagi ke KPAI Jakarta dan siangya langsung ke Mabes Polri dan diterima langsung oleh Kabareskrim Mabes Polri. Bahkan menurut Kabareskrim Mabes Polri kasusnya akan segera ditangani jika bukti-bukti sudah kuat," terang Hasbullah, paman korban, Sabtu (23/04).

Selain itu, ucap Hasbullah, pihaknya juga sudah meluncurkan surat tembusan ke berbagai pihak, diantaranya ke Kapolri, Kejagung, Kantor Menteri Agama pusat, Kapolda Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Negeri

Sumber, Kepala Kejaksaan Negeri Sumber, Kepala Kantor Kementerian Agama Sumber, Kab. Cirebon.”<sup>4</sup>

5. “Akhirnya, Ard (16), warga Jalan Lintas Enok KM 2, Enok tersangka pelaku pencabulan terhadap lima orang anak dibawah umur, Selasa (31/3) diserahkan warga ke pihak yang berwajib. Perbuatan ini dilakukan pelaku sejak tahun 2008 lalu. Celakanya, salah seorang korbannya laki-laki.

Perbuatan pencabulan ini pertama kali dilakukan tersangka terhadap korban sebut saja namanya Dedi (9), pencabulan telah dilakukan tersangka sejak tahun 2008 sampai Februari 2009 lalu.

Ternyata, pelaku tidak puas hanya terhadap satu orang korban tersebut, perbuatan ini terus berlanjut dengan melakukan pencabulan terhadap sebut saja namanya Bunga (10), Kemboja (8) dan Melati (5), tiga orang korban ini merupakan masih adik beradik. Tiga kakak beradik dikerjai oleh secara bergiliran oleh pelaku Ard disaat orang tua korban pergi ke kebun.

Perbuatan asusila ini kerap dilakukannya disebuah Langkau (bangunan tempat memanggang kelapa untuk dijadikan kopra, red) di Parit Pelajar RT 5/ RW 4 Kelurahan Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan. Para korban dicabuli oleh pelaku sejak awal tahun 2009 sampai pertengahan Maret ini.

“Ternyata pelaku tidak hanya lakukan pencabulan terhadap korban MH (9), tetapi juga terhadap tiga orang kakak beradik, yakni SN (10), SH (8) dan SNU (5), serta masih ada lagi seorang korban yang masih tetanggan tiga kakak beradik ini, yakni IS (8). Sehingga korban pencabulan oleh tersangka sebanyak lima orang, perbuatan ini telah dilakukannya sejak tahun 2008 lalu,” ungkap Kapolres Inhil AKBP Achmad Kartiko SIK MH melalui Kasat Reskrim AKP Hotasi Purba SH kepada wartawan Selasa (31/3).

Perbuatan tersangka terbongkar Minggu (29/3) ketika salah seorang dari korban mengeluh sakit pada saat buang air kecil, tentu saja keluarga korban tersebut merasa curiga. Akhirnya, korban setelah ditanyai oleh orangtuanya mengakui bahwa ia telah dicabuli oleh tersangka. Pengakuan serupa juga meluncur dari mulut korban-korban lainnya.

Tak pelak, mendengar penuturan para korban ini warga pun menjadi emosi dan hendak melakukan pemukulan terhadap tersangka. Untungnya, tindakan ini berhasil diredam oleh tokoh masyarakat disana, sampai akhirnya korban dibawa ke kantor polisi.

“Perbuatan tersangka ini dijerat pelanggaran terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 82, pelaku diancam dengan hukuman penjara 15 tahun dan denda

---

<sup>4</sup>[www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com) diakses pada 20 Agustus 2011



300 juta. Terhadap kasus ini terus kita lakukan pengembangan dengan memeriksa tersangka dan mendengarkan keterangan korban dan saksi lain,” ujar Hotasi.”<sup>5</sup>

Perlindungan hak anak sangat ditentukan oleh adanya kebijakan perlindungan anak (*Child Protection Policy*), kebijakan kesejahteraan anak (*Child Welfare Policy*) yang kondusif terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak itu sendiri. Berbagai instrumen internasional mengenai perlindungan anak pada umumnya dan anak bermasalah pada khususnya tetap saja menjadi fokus perhatian. Ini tampak pada kesimpulan hasil kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan IX (*Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) yang diselenggarakan pada tanggal 29 April-8 Mei 1995 di Kairo, Mesir. Perhatian dan bimbingan itu telah diatur dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak 1924 dan telah diakui pula dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia serta ketentuan-ketentuan khusus dari organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak.<sup>6</sup>

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Umum PBB menjelaskan keyakinanya bahwa Deklarasi Hak-Hak Anak pada akhirnya akan membawa kebahagiaan pada anak dan akan menikmati hak-hak dan kebebasannya untuk kebaikan dirinya dan masyarakat pada umumnya, dan selanjutnya meminta perhatian orang tua, pria dan wanita sebagai individu, organisasi sosial, pemerintah baik lokal maupun nasional agar mengakui hak-hak anak dan berjuang secara

<sup>5</sup>[www.polres-inhil.web.id](http://www.polres-inhil.web.id) diakses pada 20 Agustus 2011

<sup>6</sup>Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2003, h.12



bertahap untuk mewujudkannya dalam perundang-undangan atau tindakan lain sesuai dengan asas-asas sebagaimana diatur dalam Deklarasi tersebut.

Instrumen internasional mengenai perlindungan hak-hak anak tertuang dalam Resolusi PBB 44/25 tertanggal 20 November 1989 tentang *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak). Konvensi ini lahir setelah melalui jalan yang panjang. Sedangkan ketentuan Internasional yang menyangkut anak yang telah ada sebelumnya yaitu Resolusi PBB 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959 tentang *Declaration of the Right of the Child* (Deklarasi Hak-Hak anak 1959). Jiwa dari Resolusi PBB ini terkandung di dalam *Preamble* (Mukadimah). Hal-hal yang terkandung dalam Deklarasi Hak-Hak Anak berisi Mukadimah dan sepuluh asas tentang hak-hak anak.<sup>7</sup>

Di dalam Mukadimah ditegaskan tentang hal-hal sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Penegasan kembali keyakinan negara-negara anggota PBB akan hak-hak asasi manusia, martabat serta nilai-nilai kemanusiaan dan telah pula memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial suatu taraf hidup yang lebih baik dalam lingkup kebebasan yang lebih luas.
2. PBB telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaannya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lainnya, asal-usul bangsa dan tingkatan sosial, kaya miskin, keturunan atau status, dan diskriminasi.
3. Anak karena alasan kurang matangan fisik dan jiwanya, membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun setelah kelahirannya. Hal ini sangat mendasar dan universal sifatnya.

Selanjutnya sepuluh asas yang terkandung di dalam Deklarasi Hak-Hak Anak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi ini.

---

<sup>7</sup> Ibid h.13

<sup>8</sup> Ibid h.13-17

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dan menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penghisapan, ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Namun pada kenyataannya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tampaknya masih belum cukup mampu

menekan angka pelanggaran hak anak. Kewajiban Negara dalam hal memberikan jaminan perlindungan pada hak-hak anak masih belum terpenuhi. Tingginya angka kekerasan pada anak, meningkatnya jumlah anak putus sekolah, pencabulan terhadap anak, perdagangan anak dan lain sebagainya merupakan refleksi dari belum memadainya instrumen hukum berikut implementasinya di lapangan.

Berdasarkan fakta dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan penelitian hukum dengan judul **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)**





## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Merujuk dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimana realita perkaratindak pidana pencabulan dalam Pengadilan Negeri Kepanjen?
2. Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan yang melanggar Pasal 82Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa realita perkara di Pengadilan Negeri Kepanjen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan Pasal 82Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang tindak pidana pencabulan berdasarkan Pasal 82Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, dapat menambah wacana tentang dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pencabulan yang terdapat dalam pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim, dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.
- c. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban pencabulan serta berfungsi sebagai *social control* dalam upaya menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat kepada pembaca terhadap isi penulisan ini, maka dalam penulisan ini perlu dibuat secara sistematis serta mempunyai tata urutan yang jelas. Maka penulis akan menguraikan secara beruntun dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat empat uraian yaitu yang pertama menguraikan latar belakang permasalahan, kedua tentang perumusan masalah, ketiga mengenai tujuan penelitian dan keempat menjelaskan manfaat penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pemaksaan untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa atau orang lain, pengertian anak, macam-macam putusan Hakim, dasar pertimbangan putusan Hakim, dan tinjauan umum tentang penegakan hukum yang meliputi pengertian penegakan hukum dan unsur-unsur penegakan hukum.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data yang digunakan, teknik memperoleh sumber data, populasi dan sampel serta metode analisis data.

## BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah sebagaimana diuraikan dalam Bab I yang intinya berisikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pengadilan negeri Kepanjen. Kemudian dilanjutkan dengan realitas perkara pencabulan anak yang ada di kota Kepanjen dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkarapencabulan terhadap anak.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan intisari dari pembahasan masalah serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencabulan dan Anak

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melawan hukum disebut tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.

Pengertian tindak pidana dalam KUHP dengan istilah *strafbaarfeit*, oleh para pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana, sedangkan oleh para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana. Dewasa ini istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana.

Pengertian tindak pidana menurut pendapat beberapa sarjana dan penulis, antara lain<sup>9</sup> :

a) Menurut D. Simon

Tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan manusia
- Diancam dengan pidana (*straatbar gesteld*)
- Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarpersoon*)

<sup>9</sup>Bambang Poernomo. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 89.

b) Menurut J.E. Jonkers

Tindak pidana mempunyai dua arti, yaitu :

- Suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa(tidak sengaja) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Tindak pidana, peristiwa pidana, suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman.

c) Menurut Moeljanto

Tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Perbuatan manusia
- Yang memenuhi rumusan undang-undang
- Bersifat melawan hukum

d) Menurut Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.

Unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Sementara itu unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku, yang terdiri atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.



e) Menurut penulis

Suatu tindakan baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan atau aktif maupun pasifnya seseorang atau badan sebagai subyek hukum yang bersifat melawan hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan serta telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, kepadanya akan dikenakan sanksi atau hukuman.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Persepsi terhadap kata “*cabul*” tidak dimuat dalam KUHP, Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya yaitu keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)<sup>10</sup>. Sedangkan dalam Kamus Lengkap Prof. Dr. S. Wojowasito dan Drs. Tito Wasito dimuat artinya dalam bahasa Inggris, yaitu *indescient, dissolute, pornographical*.

Umumnya, cabul diterjemahkan dengan *dissolute*. Pada “The Lexicon Webster Dictionary” sebagaimana dikutip Leden Marpaung, S.H. dimuat artinya, yaitu “*loose in behavior and morals*”.<sup>11</sup>

Menurut Mr. J.M. van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung, S.H. terhadap arti kata “cabul” mengutarakan antara lain:

“.....pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan, apakah suatu tindakan tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul atau tidak.”<sup>12</sup>

<sup>10</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, h. 70

<sup>11</sup> Leden Marpaung, S.H., *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 64

<sup>12</sup> Ibid, h. 64

Sedangkan definisi pencabulan yang diberikan oleh R. Sugandhi adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatankeji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.<sup>13</sup> Definisi yang diungkapkan R. Sugandhi lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”<sup>14</sup>

Penjelasan dari Pasal 289 KUHP yaitu di sini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya.

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

<sup>13</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1998, h.305

<sup>14</sup> Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana



- Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya (Hoge Raad 15-2-1926)
- Seorang laki-laki meraba badan seorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciuminya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya (Hoge Raad tanggal 28-5-1963 N.J. 1964 No. 108)<sup>15</sup>

Di dalam Kamus Hukum juga menjelaskan mengenai arti kata pencabulan, dan dapat diartikan sebagai berikut:

“Pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan; keji dan kotor; tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan, hal ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 281 dan 282, yaitu: diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>16</sup>

Seperti yang diuraikan diatas, pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seseorang, baik yang sudah dewasa maupun belum dewasa terhadap seseorang yang di bawah umur maupun yang sudah dewasa dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Pencabulan memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual di mana seseorang memperoleh kepuasan seksual bersama orang lain. Ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengancara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan kata lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabula, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82, adalah:

<sup>15</sup> Leden Marpaung, S.H. Op. Cit. h. 65

<sup>16</sup> Soedarso, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h.64

#### A. Unsur “setiap orang”

Unsur “setiap orang” dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang ‘duduk’ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan. Hal ini untuk antara lain menghindari adanya “*error in personal*” dalam menghukum seseorang.

#### B. Unsur “dengan sengaja kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Unsur dengan sengaja di sini adalah sama dengan teori kesengajaan (*dolus*) yang artinya menghendaki terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat-akibatnya yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam unsur ini tertulis kata atau yang berarti dan bersifat alternative, maksudnya apabila salah satu saja perbuatan sudah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.



### 3. Pengertian Anak

Untuk menentukan siapakah yang disebut anak atau dengan kata lain seorang yang belum dewasa maka akan dibahas sebagai berikut.

Menurut Poerwadarminta, memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil.<sup>17</sup> Selanjutnya Koesnoen memberikan pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.<sup>18</sup> Menurut Kartono anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.<sup>19</sup> Menurut Atmasasmita anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>20</sup> Dari pengertian anak tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas, sehingga berakibat mudah kena pengaruh lingkungan sekitar. Menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. Menurut hukum adat Indonesia tidak terdapat batasan umur yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa. Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatblad No. 54. Bunyi Staatblad tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, h. 735

<sup>18</sup>R.A. Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 1964, h. 120

<sup>19</sup>K. Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, h. 187

<sup>20</sup>R. Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja (Yuris Sosio Kriminologis)*, Armico, Bandung, 1983, h. 25

“Oleh karena terhadap orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keragu-raguan sampai umur berapa seseorang masih di bawah umur. Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut oleh pemerintah dulu diadakan Staatblad 1931—54 isinya menyatakan antara lain, bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan “istilah anak di bawah umur” terhadap bangsa Indonesia, ialah:

- a) mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin;
- b) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai berai dan tidak kembali lagi di bawah umur;
- c) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas disebut anak di bawah umur (Minderjarig) atau secara mudahnya disebut anak-anak”.<sup>21</sup>

Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab kebelumdewasaan dan perwalian.<sup>22</sup> Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/ Perwakilan Rakyat menentukan: "warga Negara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dahulu mempunyai hak memilih.

<sup>21</sup> Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, h.231

<sup>22</sup> Made Sadhi Astuti, Op. Cit, hal. 7



Dari ketentuan undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang di bawah umur 17 tahun. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948 L.N.R.I tahun 1951 Nomor 12 tentang Undang-Undang Kerja memberikan pengertian "Anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah". Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 1979 L.N.R.I tahun 1979 nomor 12 tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian : "Anak adalah seorang yang belum rnenapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin".

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 1979 tentang Kesejahteraan Anak dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pengadilan anak ditentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Dengan demikian maka pengertian anak atau *juvenile* pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut penulis, pengertian anak adalah seseorang yang masih dibawah umur yang belum menikah dan masih dibawah pengawasan orang tua serta belum cakap melakukan perbuatan hukum.

## B. Tinjauan Umum Mengenai Hakim

### 1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim disebut juga kode kehormatan hakim. Selain itu, hakim juga merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan menurut pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi hakim ada 3, yaitu hakim adalah orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah), pengadilan dan juri penilai<sup>23</sup>.

Pengertian hakim menurut Kamus Hukum adalah petugas pengadilan yang mengadili perkara<sup>24</sup>. Dalam bahasa Belanda disebut *rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *judge*.

<sup>23</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

<sup>24</sup>JCT Simorangkir, Rudi Prasetya dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, 2002.



## 2. Kewajiban Hakim

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai kewajiban:

- a. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

- b. Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana.

Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

## 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam Profesi Hakim

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai

di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut<sup>25</sup> :

- a. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan.
- b. Nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan.
- d. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.
- e. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggungjawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban horizontal, Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:  
“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”
- f. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam

<sup>25</sup>C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1996, hlm 46-48.



proses pemeriksaan perkara tersebut, baik dengan terdakwa, jaksa, penasihat hukum, panitera, maupun sesama majelis hakim.

#### 4. Macam-Macam Putusan Hakim

Hakim didalam pasal 1 butir 8 KUHP adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan mengadili dalam pasal 1 butir 9 KUHP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Sedangkan menurut pasal 19 Undang-undang no.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dalam pasal 5 Undang-undang No.48 tahun 2009 menyebutkan bahwa hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kansil, bahwa pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan, baik buruknya tergantung pada manusia pelaksananya, *incasu* para hakim, syarat-syarat yang senantiasa harus terpenuhi oleh seorang hakim, yaitu jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar.<sup>26</sup>

Kekuasaan kehakiman terdapat dalam pasal 24, 24A, 248, 24C, Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Didalam pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

---

<sup>26</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Bandung, 1984, h.160.

menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan dalam ayat 2 menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kekuasaan kehakiman menurut pasal 1 Undang-Undang no 48 tahun 2009 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 2 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Dalam pasal 191 dan pasal 193 (1) KUHAP menyebutkan setidaknya terdapat tiga macam putusan hakim, yaitu:

- 1) Putusan pemidanaan. yaitu apabila yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- 2) Putusan bebas, yaitu jika hasil pemeriksaan sidang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Ketiga macam putusan hakim tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. PUTUSAN PEMIDANAAN

Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan putusan.<sup>27</sup>

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan yang mana hakim telah yakin berdasarkan alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Berarti hakim melaksanakan ketentuan pasal 193 KUHP.

Sedangkan terhadap lamanya pemidanaan (*sentencing atau sraftoemeting*) pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal-pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pemidanaan ini merupakan wewenang *yudex factie* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *yudex factie* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana ditentukan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 1953 K/Pid/1998 tanggal 23 Januari 1993.<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Lilik Muryadi, *Perihal putusan Hakim*, Perjuangan, Bandungi, 1991, h.127.

<sup>28</sup>Kumpulan Yurisprudensi, Mahkamah Agung RI, 1994, h. 59-85.

Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas minimum dan batas maksimum pidana yang harus dijalankan terdakwa, dalam hal ini hakim tidak dapat seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.

## 2. PUTUSAN PEMBEBASAN TERDAKWA

Putusan bebas ini diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHP, yang isinya menyatakan, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Ketentuan diatas sama dengan pasal 33 HIR, yang isinya menyatakan "Jika pengadilan Negeri berpendapat bahwa kesalahan orang yang dituduhkan tidak terang, maka orang itu dibebaskan...".

Pada hakikatnya kedua ketentuan tersebut diatas memiliki kesamaan makna, dengan kata lain bahwa apabila kesalahan dari terdakwa yang tidak terbukti, maka terdakwa harus diputus bebas. Sedangkan makna dari tidak adanya bukti tersebut dapat digolongkan dalam dua macam:

- a. Ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu adanya pengakuan dari terdakwa saja tidak dikuatkan oleh alat bukti yang sama.



- b. Minimum pembuktian yang diterapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua penunjukan atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.<sup>29</sup>

Penyebutan dua alat bukti merupakan pemberian batasan tentang suatu pembuktian minimum yang ditetapkan oleh undang-undang (pasal 184 KUHP), karenaitu hakim tidak diijinkan untuk menyimpang dalam menjatuhkan putusan.<sup>30</sup>

Oleh karena itu pengakuan kesalahan dari terdakwa belum cukup menjamin bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sedangkan makna keyakinan hakim bukan diartikan perasaan hakim sendiri sebagai manusia, tetapi didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang-undang.<sup>31</sup>

### 3. PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM.

Putusan semacam ini terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Pada umumnya letak kesalahan ada pada surat dakwaan dimana uraian dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan hukum pidana.

Disamping adanya kemungkinan kesalahan dalam pembuatan surat dakwaan maka terhadap terdakwa yang memenuhi pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP juga dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam pandangan

<sup>29</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni, (arti dan makna), Simplex, Jakarta, h.20

<sup>30</sup> Ibid, h.21

<sup>31</sup> Ibid, h.22

beberapa pakar, makna lepas dari segala tuntutan hukum dapat dinamakan pembebasan yang tidak sebenarnya, pembebasan seperti ini mengandung dua makna yaitu:

1. Dalam arti luas

Didalamnya termasuk pelepasan dari tuntutan, tetapi karena telah disebut pembebasan, dinamakan pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup. Pembebasan yang pada hakikatnya adalah berasal dari tuntutan dapat dipakai bila:

a. Termasuk yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana yang didalamnya termasuk:

1. Perbuatan yang didakwakan tidak mengandung segala unsur yang dikehendaki oleh undang-undang.
2. Bila perbuatan itu kehilangan sifat melawan hukum pidana.

b. Bila terdakwa, walaupun yang didakwakan merupakan tindak pidana, tidak dapat dipersalahkan kepadanya, yang didalamnya termasuk:

1. Hal-hal yang merupakan kekuatan relatif tidak dapat diatasi (*overmacht*)
2. Keadaan badaniah, yang kemungkinan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

2. Dalam arti sempit

Hakim harus memiliki perkara pidana tidak saja dari kejadian yang terbukti, tetapi juga dari surat dakwaan. Akibat dari ini maka bilamana perbuatan yang terbukti itu tidak menutup dan apa yang didakwakan, atau



dengan kata lain bahwa jika oleh kejadian yang terbukti itu tidak dibuktikan pula oleh apa yang didakwakan, maka haruslah diputus bebas.<sup>32</sup>

Dalam pasal 5(1) dan pasal 8(2) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan :

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya memerlukan pertimbangan yang didasarkan pada pembuktian. Untuk itu terlebih dahulu akan diuraikan teori pembuktian yang digunakan sebagai acuan hakim dalam menjatuhkan putusan.

1. Teori pembuktian didasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk*)

Sistem pembuktian positif (*positif wettelijk*) adalah sistem pembuktian yang manyandarkan diri pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang diterapkan oleh undang-undang adalah penting, keyakinan hakim sama sekali diabaikan, pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti sah yang ditentukan oleh undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang, namun demikian ada

---

<sup>32</sup>Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit, h. 20

kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya, sehingga benar-benar objektif. Menurut sistem pembuktian positif, yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata (*Conviction in time*)

Yaitu suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Dimana hakim hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi sangat subjektif sekali, hukum tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, seorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan.

3. Teori pembuktian berdasarkan alasan yang logis (*conviction in raisone*)

Teori pembuktian ini juga masih menyandarkan pula kepada keyakinan hakim, hakim tetap tidak terikat dari yang telah ditetapkan undang-undang. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti diluar yang telah ditentukan undang-undang. Namun demikian didalam mengambil keputusan tentang salah tidaknya seseorang terdakwa bersalah didasarkan alasan-alasan yang



jas. Hakim harus mendasarkan putusnya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasonable*). Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan tanpa batas. Pembuktian ini sering disebut dengan pembuktian bebas.<sup>33</sup>

#### 4. Teori Pembuktian Negative (*negative wettelijk*)

Menurut teori ini, unsur untuk dapat memidana terdakwa yaitu dengan adanya minimum dua buah alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Sedangkan dalam pasal 184 (1) KUHAP, menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

---

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, h.18

## 5. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Pada dasarnya, hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori apa yang dijadikan pijakan dalam penjatuhan pidana.<sup>34</sup> Dalam menjalankan kebebasan dalam rnenjatuhkan pidana inilah hakim sebagai manusia dapat menggunakan daya tafsirnya untuk menentukan pidana bagi terdakwa, sehingga sangat jelas bahwa dalam pengambilan keputusan atau penjatuhan pidana, hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Hakim di Indonesia harus dapat mengenal, menghayati, meresapi hukum yang hidup dan nilai-nilai yang ada didaerah dimana ia bertugas. Dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi konkrit, hakim harus mempunyai kebebasan untuk :<sup>35</sup>

1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan.
2. Memilih pidana pokok yang mana patut dijatuhkan apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan ataupun pidana denda sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
3. Sebenarnya sebelum hakim tiba pada pemilihan pidana, baik itu pada macammnya pidana yang diberikan ataupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Hakim dapat memilih apakah ia menjatuhkan pidana pokok dan tambahan ataupun ia menjatuhkan pidana yang diperberat saja.

Hakim dan kemerdekaan yang dimilikinya mempunyai kekuasaan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan batas minimum ke batas maksimum dalam situasi konkrit, ia tidak boleh sewenang-wenang menuruti perkataan subjektifnya, beberapa keadaan subjektif yang dapat dipertimbangkan seperti:<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum dan Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, h.48

<sup>35</sup> Andi Harnzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dan Retribusi ke Reformasi*, PT Pradnya Pararnita, Jakarta, 1985, h. 73-74

<sup>36</sup> Ibid, h.78



- a. Umur terdakwa;
- b. Jenis kelamin;
- c. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;
- d. Keseriusan delik yang bersangkutan;
- e. Nilai-nilai hukum daerah setempat;
- f. Dampak terhadap filsafat negara yakni pancasila.

Dalam pasal 55 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2008 diatur mengenai pedoman pemidanaan, yaitu:

(1) Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban ;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Mengenai penjatuhan pidana penjara, dalam pasal 71 RKUHP tahun 2008 dinyatakan bahwa:

Dengan tetap mempertimbangkan pasal 54 dan 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan sebagai berikut:

1. Terdakwa berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau diatas 70 (tujuh puluh) tahun;
2. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
3. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
4. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
5. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian besar;
6. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
7. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
8. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
9. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
10. Pidana akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya;
11. Pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;

12. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
13. Tindak pidana dilingkungan keluarga;
14. Terjadi karena kealpaan.

Apabila hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dan ancaman hukuman pokok, maka hakim harus dapat menemukan satu atau lebih alasan dibawah ini untuk dipakai dalam pertimbangannya:

- a. Kejahatan ini menggunakan kekerasan yang mengakibatkan cacat badan dan dilakukan secara keji;
- b. Terdakwa menggunakan senjata dan korban luka-luka;
- c. Terdakwa membujuk orang lain melakukan kejahatan dan ia adalah merupakan pemimpinnya;
- d. Korban berjumlah lebih dari satu orang;
- e. Terdakwa mengancam para saksi atau mempengaruhi proses peradilan dengan cara-cara lain yang dilarang undang-undang;
- f. Terdakwa dalam melakukan kejahatan melibatkan anak-anak yang belum dewasa;
- g. Kejahatan itu merupakan selundupan yang besar nilainya;
- h. Pelaksanaan kejahatan menunjukkan adanya derajat keahlian yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dahulu;
- i. Terdakwa menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk melakukan kejahatan;
- j. Salah satu atau beberapa keadaan berikut ada pada terdakwa, yaitu:
  1. Terdakwa memiliki pola tingkah laku jahat untuk jangka panjang waktu tertentu yang menunjukkan bahwa ia sangat berbahaya bagi masyarakat;
  2. Dihubungkan dengan penindakan-penindakan terhadapnya terdahulu menunjukkan adanya peningkatan tindak kejahatan;
  3. Terdakwa telah menjalani pidana untuk kejahatan yang lain dan atau pada waktu melakukan kejahatan terdakwa sedang dalam masa percobaan;
  4. Terdakwa pernah dihukum percobaan atau dilepas bersyarat dan tingkah lakunya selama dalam pengawasan adalah kurang memuaskan.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> A.Soejardi, *Lokakarya Masalah Pidanaan*, IKAHI, Jakarta, 1985, h.35



Menurut Sardjono, wakil ketua MA RI, dalam Raker Hakim dan Panitera dalam wilayah Hukum pengadilan tinggi di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1972 beliau mengatakan bahwa pertimbangan hakim tersebut harus dapat mencakup antara lain:<sup>38</sup>

1. Merupakan suatu pertanggungjawaban dari Hakim mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar putusnya terhadap masyarakat dan Negara yang dibuat dengan jalan menyusun pertimbangan tersebut.
2. Pertimbangan tersebut harus merupakan suatu pertimbangan secara keseluruhan yang lengkap tersusun secara sistematis dan satu sama lain mempunyai hubungan logis tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain.
3. Pertimbangan tersebut harus memberi gambaran bahwa:
  - a. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan sepenuhnya untuk menjelaskan pendirian masing-masing dalam membela kepentingannya dan memberi bukti yang seperlunya guna memperkuat pendiriannya.
  - b. Hakim harus menilai kekuatan pemberian tiap-tiap alat bukti dan memberikan kesimpulannya mengenai soal terbukti atau tidaknya dakwaan terhadap terdakwa.
  - c. Hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah tidak bebas melainkan terikat pada hukum, Undang-undang dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat sehingga dengan demikian segala kesan bahwa Hakim bertindak sewenang-wenang dapat dihindari.
  - d. Pertimbangan putusan tersebut harus memberi gambaran bahwa Hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah dalam rangka melaksanakan tugasnya secara tertib disertai asas tanggung jawab serta kejujuran yang tinggi berdasarkan hukum, undang-undang, dan rasa keadilan.
4. Dalam penyusunan pertimbangan-pertimbangan maka sebagai pangkal tolak harus dipergunakan pasal-pasal HIR dan Rbg, dimana dicantumkan persoalan-persoalan yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan pertimbangan itu dalam urutan tertentu, yang sebaiknya diikuti, secara singkat isi tiap-tiap alat bukti yang seharusnya dirumuskan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut.
5. Hubungan antara diktum putusan dan pertimbangan tersebut adalah bahwa setiap bagian diktum putusan harus didukung oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu, dalam hal tidak terdapat hal itu maka putusan tersebut dapat dikatakan tidak cukup dan dapat dibatalkan.

<sup>38</sup> Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, h.36

Jan Remmelink menjelaskan pula bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan. Padatingkat tertentu hal ini benar. Namun pada lain pihak juga jelas bahwa kebebasan yang dinikmati hakim tidak boleh lebih memunculkan *willekeur* ataupun *detournement de pouvoir*. Pada akhirnya hakim harus menetapkan “hukuman”, dalam arti memberikan reaksi memadai atas tindakan pidana yang dilakukan terdakwa. Tindakan pidana tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk, misalnya menjatuhkan pidana sangat tinggi yang tidak sebanding. Ini juga tidak akan sejalan dengan sistem perundang-undangan kita yang menetapkan pidana maksimum tertentu baik tiap delik serta juga dengan asas bahwa pembedaan mengabaikan adanya kesalahan. Disini nyata bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding secara wajar dengan delik yang dilakukan.<sup>39</sup>

Hakim menetapkan dan menjatuhkan sanksi pidana yang setimbang dengan kesalahan pelaku; berkenaan dengan ini ia mempertimbangkan motivasi (pelaku tatkala melakukan perbuatannya), sejarah (latar belakang), serta situasi dan kondisi personal pelaku. Kesalahan pelaku adalah dasar penetapan berat ringanya pidana. Berkenaan dengan ini, hakim harus mempertimbangkan dampak pidana tersebut dimasa depan, sebagaimana diharapkan, terhadap kehidupan pelaku dan masyarakat. Dalam hal penetapan berat ringannya pidana, apa yang akan turut dipertimbangkan adalah motivasi dan maksud tujuan pelaku; keadaan kesehatan jiwa (mentalitas) pelaku sebagaimana muncul dari tindak pidana yang ia lakukan dan adanya niatan (kesengajaan).

---

<sup>39</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h.561



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu upaya untuk memperoleh data yang dilakukan secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*). Hal ini dilakukan untuk melihat dan mengkaji tentang dasar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kepanjen karena mengkaji proses peradilan perkarapencabulan terhadap anak. Selain itu, terdapat 3 perkara pencabulan terhadap anak dengan pelaku anak yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Kepanjen setelah disahkannya Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh Presiden RI dan mulai diberlakukan sebagai hukum positif.

#### 3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>40</sup>

Sumber dari data primer berupa pengambilan data yang diperoleh di kantor Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat

---

<sup>40</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, BPFE, UII Yogyakarta, 1983, hal. 56

pertama yang terkait dengan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan kepustakaan.<sup>41</sup>

Sumber dari data sekunder ini berupa berkas perkara pencabulan anak yang ada di Pengadilan Negeri Kepanjen, yaitu terdapat berkas yang bernomor 1198/Pid. B/2009/PN. KPJ, serta penelusuran terhadap norma-norma dan azas-azas di bidang hukum pidana yang berhubungan dengan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Pasal 82 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta diperoleh melalui penelusuran literatur hukum atau studi kepustakaan (*library research*).

#### 4. Teknik Memperoleh Data

- a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara atau interview yang berupa tanya jawab dengan responden. Bentuk wawancara adalah bebas terpimpin (*directive interview*) yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

<sup>41</sup> Ronny Hanitojo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalis Indonesia. Jakarta. Hal 10.



- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumen-dokumen serta menelusuri dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku atau jurnal yang berkaitan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 5. Populasi dan Sampel

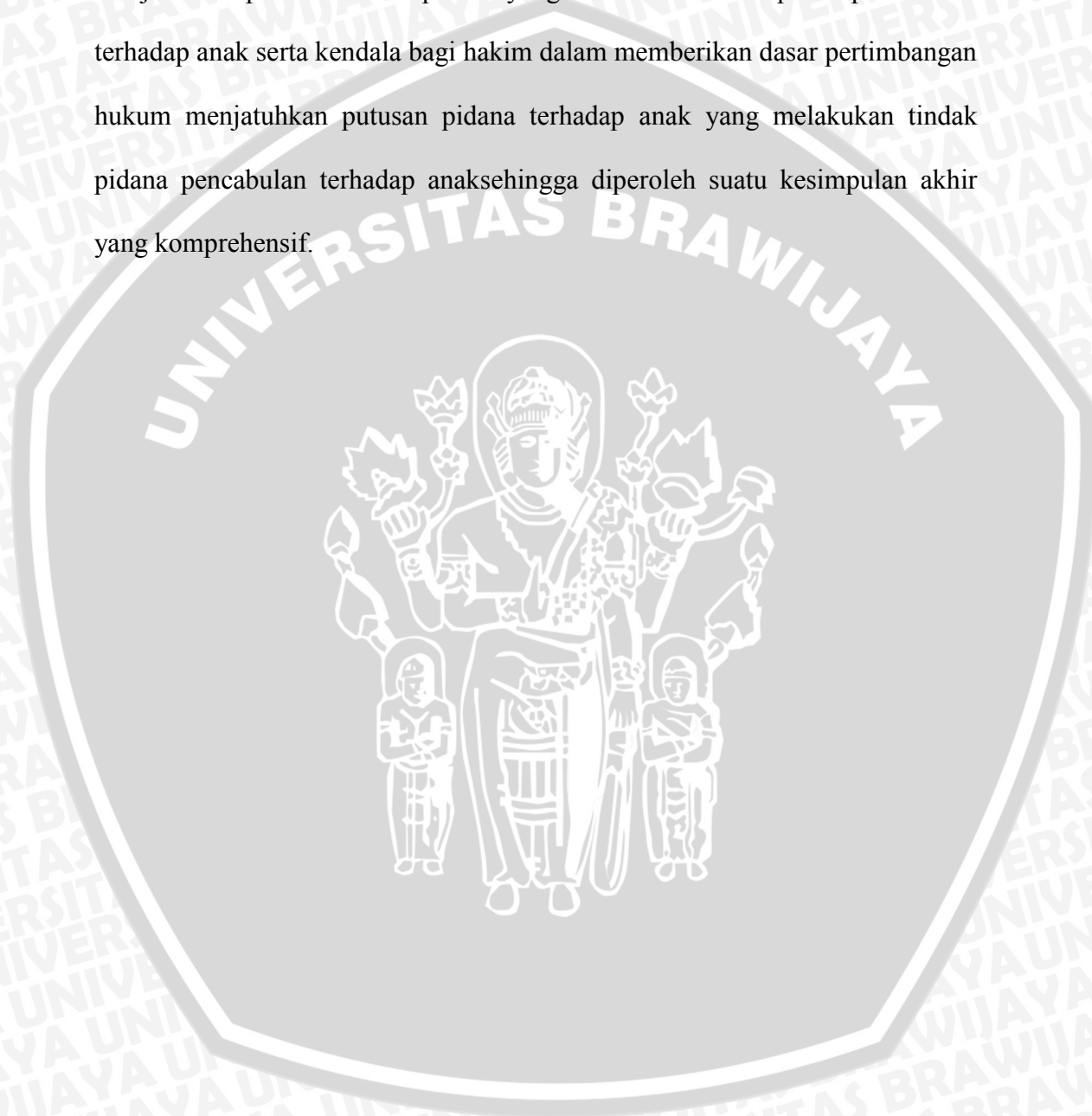
- a. Populasi adalah obyek atau individu atau gejala atau kegiatan atau unit yang akan diteliti. Populasi penelitian ini adalah 7 hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen.
- b. Sampel adalah 3 hakim yang pernah menangani perkara pencabulan dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Responden adalah 1 hakim yang pernah menangani perkara pencabulan dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Kepanjen. Dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*, yaitu menentukan responden berdasarkan tujuan dan kriteria dari penulisan skripsi yang telah ditetapkan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Ibid, hal 10.

## 6. Teknik Analisa Data

Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis dimana peneliti menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak serta kendala bagi hakim dalam memberikan dasar pertimbangan hukum menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang komprehensif.





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI KEPANJEN KABUPATEN MALANG

##### 1. Letak Geografis Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang

Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen, adapun kantor Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang berdiri diatas tanah seluas 5.250 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Panji No 205 Kepanjen. Pengadilan Negeri Kepanjen ini dahulu memiliki 6 (enam) tempat sidang, yaitu tempat sidang di kecamatan Dampit, tempat sidang di kecamatan Sumbermanjing Wetan, tempat sidang di kecamatan Pagak, tempat sidang di kecamatan Tumpang, tempat sidang di kecamatan Pujon dan tempat sidang di kecamatan Lawang. Dari 6 (enam) tempat sidang tetap (*zitting plaatsen*) tersebut diatas sampai sekarang tidak dipergunakan lagi, sebagianya rusak dan sebagian dipinjam untuk di pakai Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Malang.

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang yang di pimpin oleh seorang Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai Badan Eksekutif dan DPRD sebagai Badan Legislatif, yang terletak antara

112°17',10,90" Bujur Timur dan 122°57'00,00" Bujur Timur dan antara 7°44',55,11" Lintang Selatan dan 8°26',35,45" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 3.347,8 Km<sup>2</sup>. Suhu udara berkisar antara 20,00° Celcius hingga mencapai 27,00° Celcius.

## 2. Wilayah Yuridiksi

Daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang terdiri dari 32 Kecamatan dan 12 Kelurahan, yaitu :

- Kecamatan Donomulyo
- Kecamatan Kalipare
- Kecamatan Pagak
- Kecamatan Bantur
- Kecamatan Gedangan
- Kecamatan Wagir
- Kecamatan Dampit, terdiri dari 1 kelurahan
- Kecamatan Tirtoyudo
- Kecamatan Ampel Gading
- Kecamatan Poncokusumo
- Kecamatan Wajak
- Kecamatan Turen, terdiri dari 2 kelurahan
- Kecamatan Bululawang
- Kecamatan Gondanglegi
- Kecamatan Pagelaran
- Kecamatan Kepanjen, terdiri dari 4 kelurahan



- Kecamatan Sumber Pucung
- Kecamatan Kromengan
- Kecamatan Ngajum
- Kecamatan Wonosari
- Kecamatan Pakisaji
- Kecamatan Tajinan
- Kecamatan Tumpang
- Kecamatan Pakis
- Kecamatan Jabung
- Kecamatan Lawang, terdiri dari 2 kelurahan
- Kecamatan Singosari, terdiri dari 3 kelurahan
- Kecamatan Karangploso
- Kecamatan Dau
- Kecamatan Pujon
- Kecamatan Ngantang
- Kecamatan Kasembon



### 3. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang

#### a. Visi Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, professional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

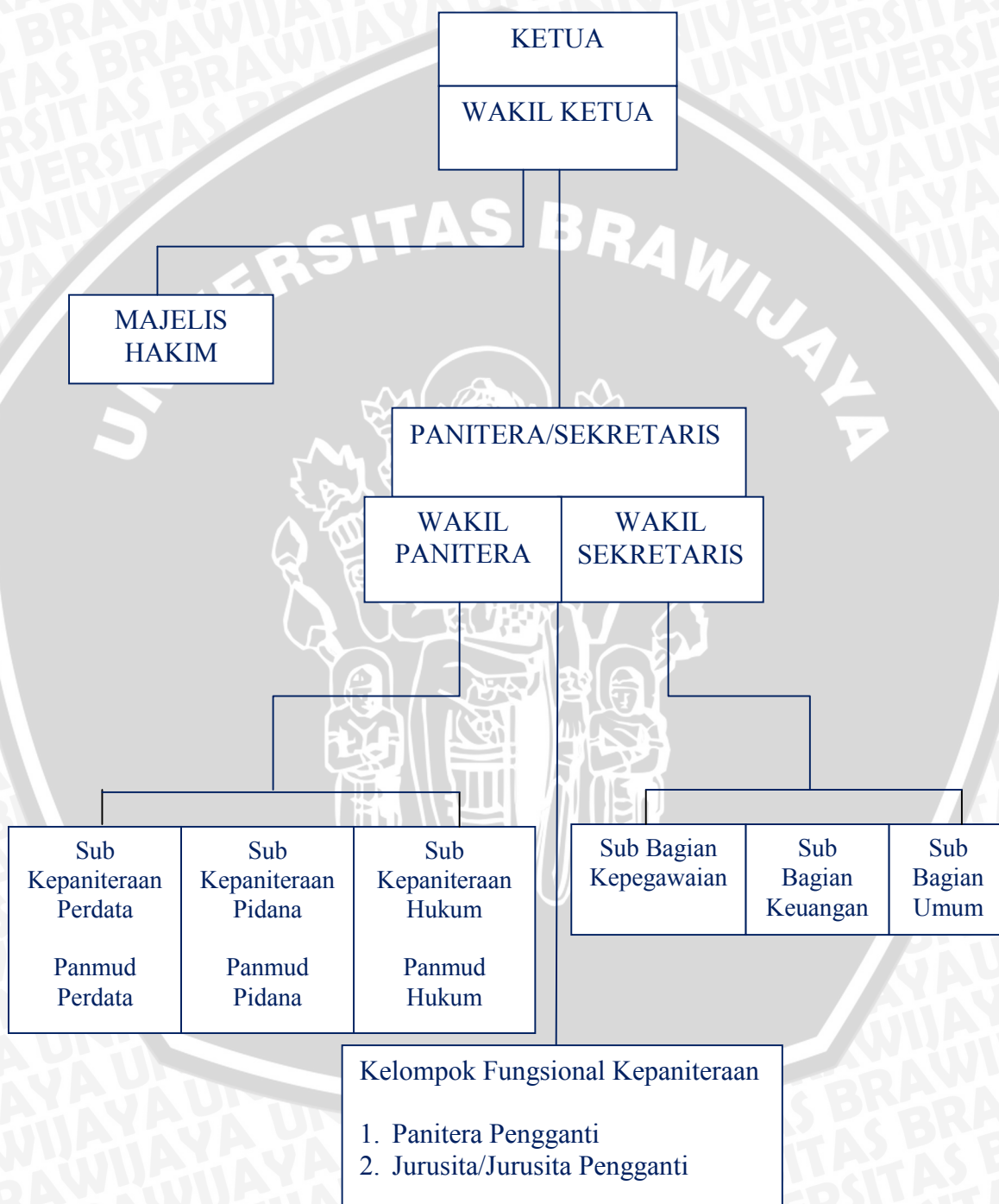
#### b. Misi Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang

- a) mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat;
- b) mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain;
- c) memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat;
- d) memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
- e) mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermatabat dan dihormati;
- f) melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.



#### 4. Struktur Organisasi

*Gambar 4.1, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang*



*Sumber : Data Sekunder, 2010*

Keterangan :

Ketua : Dr. Lilik Mulyadi, SH.MH

Wakil Ketua : H. Bambang Sasmito, SH.MH

Mejelis Hakim : - Darsriwati, SH

- Rianto Adam Pontoh, SH.MHum

- H. Sumedi, SH

- Syamsudin, SH

- Agustinus Asgari Mandala Dewa, SH

- Gutiarso, SH.MH

- Emy Tjahjani Widiastoeti, SH.MHum

Panitera/Sekretaris : Putut Djati Waluyo, SH.MH

Wakil Panitera : Hariyanto, SH

Wakil Sekretaris : Arung Wimbawan, SH.MHum

Panmud Perdata : Sigit Tjahjono, SH.MHum

Panmud Pidana : H. Suprpto, SH.MHum

Panmud Hukum : Lutfi Anwar, SH

Sub Bagian Kepegawaian : Colombus A. Sarwuna, SH

Sub Bagian Keuangan : Rr. Jetty Lestyani, SH.Mhum

Sub Bagian Umum : Sudjojo, SH.

Panitera Pengganti : terdiri dari 17 orang

Jurusita/Jurusita Pengganti : terdiri dari 24 orang



## **B. REALITA TINDAK PIDANA PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN**

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pengadilan Negeri Kepanjen telah menangani 3 (tiga) kasus pencabulan terhadap anak. Kasus pertama terjadi pada tahun 2005 dengan nomor perkara 44/ Pid.B/2005/ PN.KPJ, kasus kedua terjadi pada tahun 2006 dengan nomor perkara 688/Pid.B/2006/ PN.KPJ, kasus ketiga terjadi pada tahun 2009 dengan nomor perkara 1198/Pid. B/2009/PN.KPJ. Ketiga perkara tersebut dikenakan Pasal 82 Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

**Tabel 1**  
**Perkara Pidana Pencabulan terhadap Anak**  
**di Pengadilan Negeri Kepanjen**  
**Tahun 2004-2009**

<b>No.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Terdakwa</b>	<b>Hakim Ketua</b>
<b>1.</b>	44/ Pid.B/2005/ PN.KPJ	Andik Sutanto	Ninil Eva Yustina, S.H, M.Hum
<b>2.</b>	688/Pid.B/2006/ PN.KPJ	Agung Setiawan	Ninil Eva Yustina, S.H, M.Hum
<b>3.</b>	1198/Pid. B/2009/PN. KPJ	Angga Septian Bagus Cahyono	Ninil Eva Yustina, S.H, M.Hum

*Sumber : Data sekunder diolah.*

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa selama tahun 2004-2009 terdapat 3 perkara pencabulan terhadap anak yaitu pada tahun 2005, 2006 dan tahun 2009.

**Tabel 2**

**Tingkat Pendidikan Terdakwa Perkara Pencabulan Terhadap Anak**

No.	Terdakwa	Tingkat Pendidikan
1.	Andik Sutanto	Sekolah Menengah Pertama
2.	Agung Setiawan	Sekolah Menengah Pertama
3.	Angga Septian Bagus Cahyono	Sekolah Menengah Pertama

*Sumber : Data sekunder diolah.*

Tabel di atas menjelaskan bahwa tingkat pendidikan terdakwa adalah lulusan SMP yaitu terdakwa Andik Sutanto, terdakwa Angga Septian Bagus Cahyono, dan terdakwa Agung Setiawan.

**Tabel 3**

**Usia Terdakwa Perkara Pencabulan Terhadap Anak**

No.	Terdakwa	Usia
1.	Andik Sutanto	15 tahun
2.	Agung Setiawan	16 tahun
3.	Angga Septian Bagus Cahyono	16 tahun

*Sumber : Data sekunder diolah.*

### **C. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENCABULAN YANG MELANGGAR PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Berdasarkan realita mengenai perkara pidana Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah melalui proses persidangan dan memperoleh kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Kepanjen dapat diketahui bahwa terdapat variasi putusan berdasarkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dalam memutuskan berat ringannya suatu pidana, Hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya perbuatan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.<sup>43</sup> Berikut akan diuraikan mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak. Sebagai contoh perkara, dalam pembahasan ini digunakan perkara nomor 1198/Pid.B/2009/PN. KPJ dengan terdakwa Angga Septian Bagus Cahyono. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini diketuai oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Ninil Eva Yustina, S.H, M.Hum.

---

<sup>43</sup>Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal 62



Hakim selain menggunakan keyakinannya, juga diharuskan melalui beberapa proses dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, dengan cara sebagai berikut :

#### 1. Pembuktian

Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang terdakwa kecuali dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah serta ia merasa yakin bahwa tindak pidana itu memang telah terjadi (pasal 183 KUHAP) . Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Maka hakim dalam hukum acara pidana berkewajiban menetapkan:

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan.
- b. Apa yang telah membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.
- c. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
- d. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Oleh karena itu dalam persidangan dan menetapkan keputusan mencari kebenaran sejati dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang. Maka hakim untuk memberikan keputusan pada pelaku harus menerapkan pembuktian. Hakekat acara pembuktian adalah mencari kebenaran materiil. Dalam KUHAP terdapat 4 tahap mencari kebenaran materiil yaitu melalui :

- a) Penyidikan
- b) Penuntutan
- c) Pemeriksaan dalam persidangan
- d) Pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan.

Pembuktian ini sangat berperan sebagai pertimbangan untuk menentukan lamanya pidana. Bukti itu akan menjadi terang terhadap tindak pidana yang didakwakan dan menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan sebagai pelaku serta untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Namun hal tersebut terkadang dirasa sangatlah sulit oleh hakim terutama dalam tindak pidana perkosaan, sebab seringkali wanita dan anak-anak yang menjadi korban mengalami trauma yang hebat sehingga tidak melaporkan kejadian yang baru dialaminya.<sup>44</sup> Hal itu, juga menjadi faktor penghambat dalam proses pemidanaan atas tindak pidana perkosaan yang mana korban adalah anak dibawah umur.

## 2. Jenis-jenis alat bukti

Alat bukti mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam KUHAP diatur 5 jenis alat bukti, yaitu :

### a. Keterangan saksi

Keterangan saksi (pasal 1 angka 27) adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Keterangan saksi yang

---

<sup>44</sup>Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 38.

tertulis harus dibacakan di muka hakim dan setelah itu diserahkan kepada hakim. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>45</sup>

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli (pasal 1 angka 28) adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam perkara ini, keterangan ahli diperoleh dari dokter RSUD yang telah ditunjuk Pengadilan Negeri Kepanjen dan berwenang untuk memberikan visum.

c. Surat

Surat (pasal 187) adalah tulisan yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang suatu peristiwa dengan disertai alasan-alasan.

d. Petunjuk

Petunjuk (pasal 188) adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

---

<sup>45</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 185 ayat 2.



e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa (pasal 189) ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Kekuatan Pembuktian Alat-alat Bukti yang diajukan dalam sidang harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP sedangkan syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi-saksi baik saksi ahli, saksi terdakwa, saksi korban, atau saksi-saksi lain yang dihadirkan dalam pemeriksaan di persidangan dapat dikatakan sah apabila syarat formil dan syarat materiil telah dipenuhi. Syarat formil berupa : seorang saksi harus mengucapkan sumpah dan janji baik sebelum maupun setelah memberikan keterangan (Pasal 160 ayat 3 dan 4 KUHAP) dan seorang saksi telah mencapai usia dewasa (telah mencapai usia 15 tahun atau lebih atau sudah menikah). Sedangkan orang yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa disumpah dan hanya dianggap sebagai keterangan biasa (Pasal 171 butir a KUHAP). Syarat materiil yaitu melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (Pasal 1 butir 26 atau 27 KUHAP), seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksiannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP) dan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Asas ini terkenal dengan sebutan *unus testis nullus testis* (Pasal 185 ayat 2 KUHAP).

Beberapa hal yang dapat mengakibatkan tidak timbulnya keyakinan pada diri hakim, di antaranya adalah :<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Ninil Eva Yustina, S.H, M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, tanggal 5 Juni 2011.

1. Masalah keutuhan barang bukti.
2. Masalah teknis pengumpulan barang bukti
3. Masalah pengetahuan aparat penegak hukum

#### **Masalah keutuhan barang bukti**

Setelah peristiwa pencabulan terjadi, korban umumnya akan segera mandi. Seprei atau lantai yang mengandung bercak mani atau darah atau barang bukti lainnya seringkali telah dibersihkan sebelum penyidik tiba di tempat kejadian perkara (TKP). Hal semacam ini tanpa disadari akan menyebabkan hilangnya barang bukti seperti cairan/bercak mani, rambut pelaku, darah pelaku dan sebagainya, yang diperlukan untuk pembuktian di pengadilan. Kelambatan korban melapor ke polisi karena perasaan malu atau ragu juga menyebabkan hilangnya barang bukti karena berlalunya waktu.

#### **Masalah teknis pengumpulan barang bukti**

Pengolahan TKP dan teknik pengambilan barang bukti merupakan hal yang amat mempengaruhi pengambilan kesimpulan oleh hakim. Pada suatu kejadian pencabulan dan delik susila lainnya penyidik mencari sebanyak mungkin barang yang nantinya dapat dijadikan alat bukti yang mungkin ditinggalkan di TKP seperti adanya sidikjari, rambut, bercak mani pada lantai, seprei atau kertas tissue di tempat sampah dan sebagainya. Pemeriksaan barang bukti yang ada pada tubuh korban juga akan menguatkan hakim dalam mengambil kesimpulan.

#### **Masalah pengetahuan aparat penegak hukum**



Arah penyidikan harus jelas agar pengumpulan bukti menjadi terarah dan sempurna. Kesalahan dalam membuat tuduhan, misalnya dapat membuat tersangka menjadi bebas. Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yaitu pada pengungkapankasus pencabulan terhadap anak. Kasus kejahatan kesusilaan membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud yaitu keterangan dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban.<sup>47</sup>

Mengenai proses penjatuhan pidana pada perkara pencabulan terhadap anak, berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, proses pemidanaan dimulai dari awal sampai akhir persidangan. Proses sidang dibagi dalam tiga tahap, yaitu sebelum persidangan, persidangan dan pelaksanaan putusan. Selama ini, dalam melakukan proses persidangan tidak mengalami hambatan yang mempersulit jalannya proses persidangan. “Semua proses persidangan diatur dalam KUHP dan UU No. 48 Tahun 2009, tapi yang agak menghambat jalannya persidangan adalah sulitnya mendatangkan saksi di pengadilan. Namun, hal itu tidak menjadi alasan untuk mempersulit jalannya persidangan. Karena saksi mempunyai alasan tersendiri untuk tidak hadir dalam persidangan. Namun, apabila sudah dipanggil 3 kali tetap tidak hadir dalam persidangan maka akan dikenakan sanksi”.<sup>48</sup>

<sup>47</sup>Syamsudin K, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sriwijaya, Palembang, 2004.

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Ninil Eva Yustina, S.H, M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, tanggal 5 Juni 2011.



Dalam hal putusan hakim, hakim memutuskan berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan seperti yang tertera dalam pasal 183 dan pasal 184 KUHP dengan pertimbangan unsur-unsur pada tuntutan Jaksa dan KUHP. Selain itu hakim juga harus melihat pada unsur-unsur pidananya dalam KUHP seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan.<sup>49</sup> Seorang hakim dapat memberi hukuman pidana hanya yang tertera/tercantum dalam pasal 10 KUHP.

Hakim dalam memberikan putusan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang masing-masing hakim yang mempengaruhi pertimbangannya dalam memberikan putusan.<sup>50</sup> Ia juga harus memperhitungkan sifat dan seriousness delik yang dilakukan oleh pelaku, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan dengan usia pelaku, tingkat pendidikan, apakah pelaku tersebut merupakan seorang laki-laki ataupun perempuan, lingkungan tempat pelaku berasal dan lain-lain. Hal tersebut seharusnya mempermudah kerja hakim dalam menjatuhkan pidana, karena ia dapat bergerak bebas dalam menentukan berat ringannya hukuman.

Ada hal-hal tertentu di luar ketentuan hakim yang menjadi pertimbangan untuk memperingan putusan pada tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu:<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Ninil Eva Yustina, S.H, M.HumHakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, tanggal 5 Juni 2011.

<sup>50</sup>Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm 12

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Ninil Eva Yustina, S.H, M.HumHakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, tanggal 5 Juni 2011.

- a. Adanya sikap terus terang dalam persidangan;
- b. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya;
- c. Sopan dalam persidangan;
- d. Belum pernah dihukum atau bukan residivis;

Begitu pula sebaliknya, ada beberapa hal di luar ketentuan hakim yang memperberat putusan pada tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu :

- a. Sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis atau perkara yang lain;
- b. Sikap tidak sopan dan tidak menghormati persidangan;
- c. Perbuatan tersebut membahayakan nyawa dan tubuh seseorang;
- d. Menunjukkan sikap berbelit-belit saat memberi keterangan di persidangan;
- e. Ada perbuatan tindak pidana lain di samping tindak pencabulan itu sendiri;
- f. Tidak ada itikad baik dari pelaku untuk meminta maaf atau bertanggungjawab kepada korban;
- g. Korban pencabulan masih di bawah umur;
- h. Korban pencabulan mengalami gangguan psikologi yang berat;
- i. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pengadilan Negeri Kepanjen telah menangani 3 (tiga) kasus pencabulan terhadap anak. Kasus pertama terjadi pada tahun 2005 dengan nomor perkara 44/Pid.B/2005/PN.KPJ, kasus kedua terjadi pada tahun 2006 dengan nomor perkara 688/Pid.B/2006/PN.KPJ dan kasus ketiga terjadipada tahun 2009 dengan nomor perkara 1198/Pid. B/2009/PN. KPJ. Ketiga perkara tersebut dikenakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tingkat pendidikan ketiga terdakwa adalah lulusan SMP yaitu terdakwa Andik Sutanto, terdakwa Angga Septian Bagus Cahyono, serta terdakwa Agung Setiawan.
2. Dalam memutuskan berat ringannya suatu pidana, Hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukanya perbuatan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, dan pandangan



masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Hakim meliputi hukum pidana sebagai dasar pertimbangan Hakim, Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Hakim, dan tuntutan masyarakat sebagai dasar pertimbangan Hakim. Faktor-faktor tersebut yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak.

## **B. Saran**

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tampaknya masih belum cukup mampu menekan angka pelanggaran hak pada anak. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan Anak, pada tahun 2006 terdapat 51 kasus pencabulan terhadap anak dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 81 kasus. Ini merupakan refleksi dari belum memadainya instrumen hukum berikut implementasinya di lapangan. Seharusnya negara memberikan proteksi lebih kepada anak, dalam bentuk regulasi yang sepenuhnya bermuara pada terpenuhinya hak-hak anak, selain pranata hukum dengan sanksi tegas juga dalam tatanan implementasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja (Yuris Sosio Kriminologis)*. Armico. Bandung.
- Hamzah, Andi. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dan Retribusi ke Reformasi*. PT Pradnya Pararnita. Jakarta.
- Hanitojo Soemitro, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jumetri*. Ghalis Indonesia. Jakarta.
- K., Syamsudin. 2004. *Perbuatan Melawan Hukum*. Sriwijaya. Palembang
- Kansil, C.S.T. 1996. *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Pramita. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Bina Aksara. Bandung.
- Kartono, K. 1981. *Gangguan-gangguan Psikis*. Sinar Baru. Bandung.
- Koesnoen, R.A. 1964. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur. Bandung.
- Marpaung S.H., Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. BPFE. UII Yogyakarta.
- Muladi, Arief Barda Nawawi. 1984. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Muryadi, Lilik. 1991. *Perihal putusan Hakim*. Perjuangan. Bandung.
- Poernomo, Bambang. 1997. *Azas-azas Hukum Pidana*. Dahlia Indonesia. Jakarta
- Poerwadaminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 2003. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco. Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni, (arti dan makna)*. Simplex. Jakarta.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sadhi Astuti, Made. 2003. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Universitas Negeri Malang. Malang.
- Sani, Abdullah. 1992. *Hakim dan Keadilan Hukum*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Seno Adji, Oemar. 1984. *Hukum dan Hakim Pidana*. Erlangga. Jakarta.
- Soedarso. 1992. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta
- Soedjadi, A. 1985. *Lokakarya Masalah Pemidanaan*. IKAHI. Jakarta
- Soedjono. 1983. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni. Bandung.
- Sugandhi, R. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya.

### Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008

**Penelusuran Internet**

[www.makassarterkini.com](http://www.makassarterkini.com) diakses pada 20 Agustus 2011  
[www.kaskus.us](http://www.kaskus.us) diakses pada 20 Agustus 2011  
[www.komhukum.com](http://www.komhukum.com) diakses pada 20 Agustus 2011  
[www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com) diakses pada 20 Agustus 2011  
[www.polres-inhil.web.id](http://www.polres-inhil.web.id) diakses pada 20 Agustus 2011

